

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjelaskan bahwa KPH merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Salah satu pembagian KPH sesuai fungsi pokok dan peruntukannya adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL). Hal ini ditetapkan karena sebagian dan atau seluruhnya didominasi oleh kawasan hutan lindung. Berdasarkan Undang-Undang No 41 tahun 1999, pasal 1 menyebutkan bahwa hutan lindung mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Salah satu KPHL yang ada di Provinsi Lampung adalah KPHL Batutegi. Kawasan hutan lindung Batutegi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan yang telah tergabung dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan) melalui pemberian izin usaha pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm). Kawasan hutan sangat penting bagi masyarakat di sekitar hutan untuk menunjang kelangsungan hidup masyarakat dari hasil hutan.

Pemanfaatan kawasan hutan melalui IUPHKm diwilayah KPHL Batutegei hingga saat ini terdapat 24 Gapoktan dan 10 diantaranya telah mendapatkan IUPHKm serta sisanya sedang dalam tahap fasilitasi pengajuan permohonan IUPHKm maupun dalam tahap diverifikasi Kementerian Kehutanan (RPHJP KPHL Batutegei, 2014). Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014, Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat, dan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Hutan Kemasyarakatan Bina Wana Jaya I merupakan salah satu HKm yang telah mendapatkan hak akses izin usaha pemanfaatan berdasarkan SK Menhut No. 751/Menhut-II/2009 pada tanggal 2 November 2009 dan SK Bupati No. B.266/39/12/2009 tanggal 11 Desember 2009. Hutan Kemasyarakatan tersebut selama ini dikelola dengan sistem agroforestri. Menurut Hairiah, dkk (2003) menjelaskan bahwa agroforestri merupakan sistem penggunaan lahan yang mengkombinasikan tanaman berkayu dengan tanaman tidak berkayu (kadang-kadang dengan hewan) yang tumbuh bersamaan atau bergiliran pada suatu lahan, untuk memperoleh berbagai produk dan jasa (*service*) sehingga terbentuk reaksi ekologis dan ekonomis antar komponen tanaman. Pengelolaan dengan sistem agroforestri pada HKm Bina Wana Jaya I dilakukan dengan mengkombinasikan dengan jenis tanaman serbaguna atau *Multi Purpose Trees Species* (MPTS) seperti petai, jengkol, kemiri, kakao dan sebagian besar didominasi oleh kopi.

Sejak dikeluarkannya izin pemanfaatan, hutan kemasyarakatan Bina Wana Jaya I telah berdiri selama 5 tahun hingga saat ini. Pengelolaan HKM Bina Wana Jaya I dengan sistem agroforestri diharapkan mampu menjaga fungsi pokok kawasan lindung batutegi dan membantu meningkatkan kesejahteraan petani yang mengusahakannya, sebagaimana tertera pada visi dari KPHL Batutegi. Berdasarkan hal tersebut, gambaran kesejahteraan petani dapat dilihat dengan menggunakan penanda tingkat kesejahteraan petani yaitu konsep Nilai Tukar Pendapatan Rumah tangga Petani (NTPRP) (Sugiarto, 2008). Nilai tukar pendapatan rumah tangga petani tersebut merupakan ukuran kemampuan rumah tangga petani di dalam memenuhi kebutuhan subsistennya. Konsep NTPRP tersebut dikembangkan dari konsep Nilai Tukar Subsisten (NTS). Nilai tukar pendapatan yang menggunakan konsep NTS sudah memasukkan semua usaha pertanian, tetapi belum memasukkan buruh tani dan sektor non-pertanian (Supriyati, 2005). Pemasukan pendapatan petani juga dibantu dari luar sektor pertanian, sehingga muncul konsep NTPRP yang didalamnya memasukkan hasil pertanian, buruh tani, hasil non-pertanian dan buruh non-pertanian.

Konsep NTPRP selama ini diterapkan pada bidang pertanian agroekosistem. Petani biasanya mengelola lahannya sendiri ataupun menggarap lahan orang lain dengan sistem bagi hasil untuk memperoleh manfaat atau pendapatan. Tanaman dalam pertanian agroekosistem biasanya seperti padi, tebu, tembakau, maupun sayuran dan lain-lain. Namun pada kenyataannya terdapat petani yang tidak hanya mengelola lahan pada pertanian agroekosistem untuk memperoleh manfaat atau pendapatan. Salah satunya yaitu petani disekitar hutan, yang tidak memiliki lahan sendiri sehingga petani tersebut memanfaatkan kawasan hutan untuk

memperoleh pendapatan bagi kelangsungan hidupnya. Tanaman yang ditanam di dalam lahan kawasan hutan lebih mengarah ke tanaman kehutanan yang dikombinasikan dengan tanaman tahunan atau MPTS yang dapat diambil buahnya biasanya lebih dikenal dengan sistem agroforestri, seperti kopi, kakao, kemiri, durian, cengkeh dan lain-lain.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini konsep NTPRP diterapkan pada petani di sekitar lahan kawasan hutan dan penelitian ini belum pernah dilakukan pada tingkat petani dengan menggunakan sistem agroforestri di Hutan Kemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai tukar pendapatan rumah tangga petani yang dapat melihat gambaran kesejahteraan petani berdasarkan pemenuhan kebutuhan subsistennya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Berapa besar nilai tukar pendapatan rumah tangga petani agroforestri di Hutan Kemasyarakatan Bina Wana Jaya I Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batutegi Kabupaten Tanggamus?
2. Apakah faktor-faktor pembentuk nilai tukar pendapatan rumah tangga petani agroforestri di Hutan Kemasyarakatan Bina Wana Jaya I Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batutegi Kabupaten Tanggamus?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menghitung nilai tukar pendapatan rumah tangga petani agroforestri di HKm Bina Wana Jaya I KPHL Batutegi Kabupaten Tanggamus.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk nilai tukar pendapatan rumah tangga petani agroforestri di HKm Bina Wana Jaya I KPHL Batutegi Kabupaten Tanggamus.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

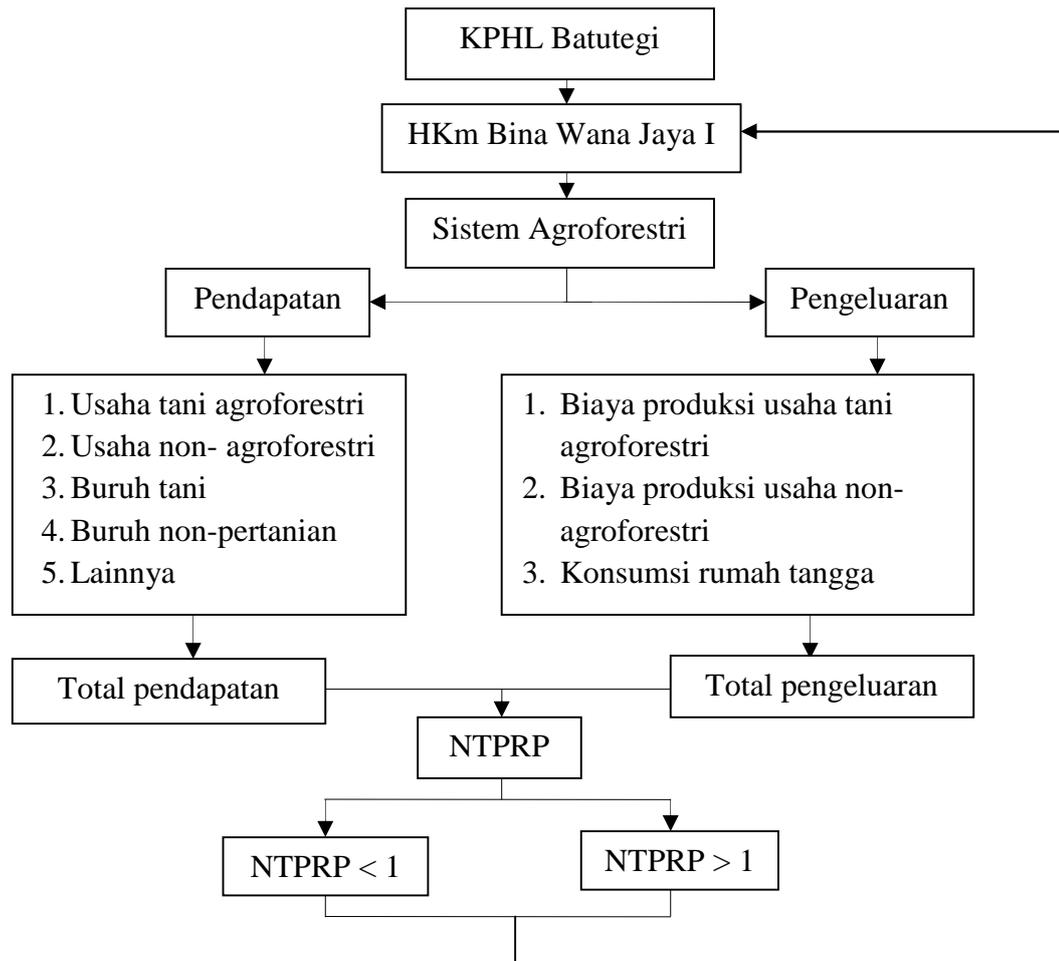
1. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan pertimbangan dalam mengembangkan kegiatan agroforestri untuk peningkatan kesejahteraan petani.
2. Bagi dunia pendidikan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai referensi tentang nilai tukar pendapatan rumah tangga petani agroforestri di hutan kemasyarakatan pada Hutan lindung.
3. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dalam pembuatan maupun perbaikan kebijakan terkait untuk mendorong peningkatan kesejahteraan petani.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batutegi ditujukan untuk mengelola kawasan hutan yang melintasi empat kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Tanggamus yang secara keseluruhan merupakan kawasan lindung (RPHJP KPHL Batutegi, 2014). Berdasarkan SK 650/Menhut-II/2010 KPHL Batutegi memiliki luas ± 58.162.

Hutan Kemasyarakatan Bina Wana Jaya I merupakan salah satu HKm yang telah mendapatkan izin pengelolaan di KPHL Batutegi Kabupaten Tanggamus.

Program HKm yang melibatkan masyarakat sekitar hutan dapat membantu dalam menjaga fungsi dan kelestarian kawasan hutan lindung. Pengelolaan HKm Bina Wana Jaya I dilakukan dengan menggunakan sistem agroforestri yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tanpa merusak fungsi utama dari kawasan lindung tersebut. Manfaat yang diperoleh masyarakat dapat berupa penambahan pemasukan finansial bagi masyarakat sekitar hutan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu cara menentukan tingkat kesejahteraan petani yaitu dengan menggunakan konsep nilai tukar pendapatan rumah tangga petani yang merupakan nisbah antara pendapatan total rumah tangga dengan pengeluaran total rumah tangga (supriyati, 2005). Apabila $NTPRP < 1$, maka tingkat kesejahteraan rumah tangga petani belum masuk kategori sejahtera, sedangkan $NTPRP > 1$ menyatakan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani dikategorikan sejahtera (Zebua, 2010 dalam Sundari dkk; 2012). Pendapatan total rumah tangga petani agroforestri diperoleh dari penjumlahan seluruh nilai hasil produksi komoditas agroforestri yang dihasilkan petani, nilai dari berburuh tani, nilai hasil produksi usaha non-agroforestri, nilai dari berburuh non-pertanian, dan lainnya. Sedangkan pengeluaran total rumah tangga petani agroforestri diperoleh dari penjumlahan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran untuk biaya produksi.



Gambar 1. Diagram Alir Kerangka Penelitian.